**Strategi Kelompok Nelayan dalam Mereduksi Politik Patron Klien di Kabupaten Maros**

1Abdul Chalid, 2Taufiq Manji

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi

[bibipariwa@gmail.com](mailto:bibipariwa@gmail.com) [taufiqmanji.tm@gmail.com](mailto:taufiqmanji.tm@gmail.com)

Abstrak

Kecamatan Bontoa merupakan daerah pesisir yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh penduduk nelayan. Pada masyarakat ini berlaku tatanan sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan material atau sumber daya ekonomi dari sektor kelautan yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Sumber daya tersebut meliputi modal dan alat tangkap yang hanya dimiliki oleh segelintir nelayan. Hal tersebut sebagai faktor utama lahirnya pembagian kerja yang berdampak pada stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat nelayan setempat. Nelayan yang tidak memiliki alat tangkap disebut sawi, bekerja pada nelayan yang memiliki alat tangkap disebut punggawa. Sistem ini telah berlangsung secara turun temurun. Terjadi hubungan timbal balik yang saling tergantung satu dengan lainnya. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak sejajar. Punggawa memiliki posisi sebagai patron dan nelayan pekerja sebagai klien. Punggawadi Kecamatan Bontoa merupakan tokoh kuat yang pengaruhnya hampir menyamai pengaruh seorang bangsawan pada masa lalu. Dalam kegiatan elektoral pengaruh punggawa ini dimanfaatkan secara maksimal oleh aktor politik yang berkontentasi memperebutkan kursi kepala daerah. Sebagian nelayan menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat karena menciptakan ketergantungan secara ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Sebab itu, berusaha menciptakan budaya demokrasi melalui kelompok nelayan.

Kata Kunci : Strategi Politik Kelompok Nelayan, Patronase, Elektoral

**PENDAHULUAN**

Praktik politik patronase pada umumnya memanfaatkan kondisi miskin masyarakat dalam mempertukarkan pilihan politik dengan perlindungan ekonomi. Di Indonesia, fenomena ini salah satunya dapat dipotret pada kehidupan masyarakat nelayan yang sebagian besar masih hidup dalam garis kemiskinan. Tidak terkecuali masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan. Masyarakat nelayan rentan secara ekonomi karena akses sumber penghidupan mereka terbatas pada lautan yang proses produksinya dipengaruhi oleh cuaca atau musim dan kepemilikan alat tangkap. Masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan tersebar di sepanjang pesisir 17 daerah yang berbatasan langsung dengan selat Makassar dan Teluk Bone. Sebagian besar lainnya hidup di pulau yang tersebar di perairan Makassar. Termasuk di antaranya terdapat di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Di daerah tersebut,sebagian besar nelayan tidak mampu untuk mengakses alat tangkap secara individu karena membutuhkan modal besar. Mereka yang masuk kategori tersebut akhirnya memilih bekerja pada nelayan-nelayan pemiliki modal besar yang memiliki kapal dan usaha produksi sektor ekonomi kelautan lainnya.

Di tengah komunitas ini kemudian dikenal dengan istilah punggawa. Jumlah sangat terbatas di tengah masyarakat nelayan. Hingga tahun 2020, nelayan Bontoa hanya memiliki 5 punggawa darat yang dikenal secara luas. Sisanya, nelayan pekerja yang disebut sawi. Di antara Punggawa dengan sawi terjadi hubungan timbal balik yang saling tergantung satu dengan lainnya. Namun hubungan tersebut tidak sejajar karena punggawa memiliki posisi sebagai patron yang memberikan perlindungan secara ekonomi, sementara nelayan pekerja sebagai klien yang memberikan jasa termasuk dukungan dalam politik. Bila ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, punggawa memiliki kontribusi bagi masyarakat nelayan karena bisa memberikan perlindungan berupa pemenuhan kebutuhan secara materi bagi sawi. Perlindungan ekonomi itu biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman berupa uang, atau bantuan cuma-cuma seperti biaya sekolah bagi anak nelayan, biasa kesehatan, dan lain-lain.

Namun di sisi lain, punggawa secara tidak langsung menciptakan ketergantungan bagi sawi sehingga menutup peluang pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat nelayan. Demikian pula pada aspek politik. Di tengah berlakunya rezim pemilihan umum saat ini punggawa sangat berpengaruh dalam mengarahkan perilaku atau pilihan politik nelayan pada setiap kegiatan elektoral; dari pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, legislatif, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini sangat berlawanan dengan prinsip demokrasi di Indonesia yang mengedepankan pilihan sadar dan memberikan hak sama serta kebebasan bagi warga negara untuk menentukan pilihan politiknya. Melalui para punggawa praktik politik patronase dijalankan secara efektif oleh elit politik. Fenomena ini juga berdampak secara negatif bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik nelayan. Secara ekonomi, nelayan memiliki kergantungan secara kuat pada punggawa-punggawa sehingga menyulitkan mereka meningkatkan taraf hidup secara terbuka. Pada kehidupan sosial politik, nelayan tidak bebas menentukan pilihan politiknya dalam proses demokrasi di daerah seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah.

Dominasi punggawa di berbagai aspek ini, termasuk dalam politik elektoral juga disadari oleh sebagian nelayan di Bontoa. Oleh karena itu, sebagian nelayan yang tergabung dalam beberapa kelompok menginisiasi kemandirian nelayan dalam mengakses sumber daya hasil laut. Dengan konsep pemberdayaan yang inklusif, sejumlah kelompok nelayan berusaha membangun partisipasi di bidang politik secara kolektif. Tujuannya tidak lain adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan serta kemerdekaan dalam menentukan pilihan politik pada setiap momentum pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini merumuskan 2 pokok permasalahan: 1) Bagaimana strategi politik kelompok nelayan mereduksi politik patron-klien antara punggawa dan elit politik di Kabupaten Maros; 2) Bagaimana pengaruh strategi politik kelompok nelayan pada kehidupan demokrasi pada masyarakat nelayan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi politik kelompok nelayan dalama mereduksi politik patron-klien di Kabupaten Maros, 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh strategi politik kelompok nelayan pada hubungan patron-klien dalam proses elektoral dan dampaknya terhadap demokratisasi di tengah masyarakat nelayan.

Politik patronase dalam bentuk yang kompleks merupakan jejaring hubungan patron-klien yang mempertukarkan perlindungan seorang patron dengan dukungan politik seorang klien. Dengan tujuan untuk mencari keuntungan secara individu relasi dua arah rupanya bisa terubah menjadi relasi tiga arah apabila di dalam suatu komunitas. Patron juga berfungsi sebagai broker untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka. Broker diartikan sebagai orang yang menjembatani relasi antara anggota komunitas yang kurang memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar komunitasnya dan mereka berada di luar komunitas memiliki jaringan luas.Broker memiliki peran sentral dalam membangun jejaring hubungan politik patron-klien. Relasi tersebut bersifat hierarkis yang digambarkan oleh James Scott dalam dua model, yaitu jaringan patron-klien yang berbentuk klaster dan jaringan yang berbentuk piramida.

**Gambar 1  
Jaringan Politik Patronase Model Klaster**



Dalam jaringan itu hubungan seorang patron dengan klien bersifat tunggal dan langsung secara vertikal. Dalam jejaring ini menurut Scott, seorang patron benar-benar hanya menjalankan fungsinya sebagai seorang pelindung yang memberikan jaminan berupa bantuan ekonomi, akses pengetahuan dan keterampilan, dan lain sebagainya kepada seorang klien. Sebaliknya klien langsung terikat pada patron secara langsung, dan memberikan dukungan yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Sementara model kedua jejaring politik patronase menurut Scott adalah bentuk klaster dalam jaringan yang lebih besar. Hubungan tetap fokus pada satu patron tunggal, akan tetapi dalam jaringan ini terdapat patron perantara yang bertugas mendistribusikan pertukaran antara patron utama dengan klien- kliennya.

Walaupun bertugas sebagai perantara seorang patron tetap memungkinkan memiliki hubungan bersifat sejajar dengan patron utama. Hubungan mereka hanya dalam aliansi karena disatukan oleh tujuan atau kepentingan politik yang sama. Hubungan ini oleh Scott disebut sebagai hubungan berlatar kategoris dimana hubungan diikat oleh kepentingan kolektif yang memiliki corak atau karakteristik sama, seperti karena ikatan etnik, agama, ideologi politik, dan lain sebagainya. Hubungan ini menjadi dasar terbentuknya faksi politik. Lebih luas lagi seorang patron perantara memiliki jaringan patron lagi di bawahnya. Mereka terdiri dari patron-patron yang secara lokal memiliki pengaruh sosial. Jaringan patron ini bersedia menjadi klien politik untuk mempertahankan eksistensi mereka di tengah komuitas masyarakat tertentu misalnya monopoli terhadap sumber daya ekonomi, kedudukan sosial, pengaruh politik di tingkat lebih kecil seperti desa, dan lain sebagainya. Mereka bisa jadi memang terdiri dari patron-patron yang selama ini memiliki kedudukan sebagai pelindung bagi sekelompok klien di tengah komunitas masyarakat tertentu. Tetapi bisa pula hanya sebagai perantara untuk komunitas sosial yang diikat oleh kepentingan kolektif.

**Gambar 2  
Jaringan Politik Patronase Model Piramida**













**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan berdasarkan teknik kesesuaian dan bola salju yang dibagi atas pendekatan yaitu pembicaraan informal *(informal conversational interview*), wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), dan wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*). Pada penelitian ini, penulis lebih cenderung menggunakan model ke tiga yaitu wawancara terbuka berdasarkan panduan umum wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Den- gan model ini penulis mengelaborasi setiap pertanyaan menjadi lebih spesifik sesuai rumusan masalah agar dapat mendapatkan informasi yang diinginkan dari informan. Dengan pendekatan ini, wawancara juga berlangsung secara lepas atau terjadi diskusi secara timbal balik tanpa mem- bebani narasumber daftar-daftar pertanyaan yang disusun secara formal. 2) Observasi Lapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini juga sebagian besar diperoleh melalui observasi peneliti di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. 3) Kepustakaan dan dokumen. Pengumpulan data melalui teknik kepustakaan dilakukan pada awal penelitian hingga penyusunan hasil penelitian lapangan. Sumber kepustakaan yang di maksud adalah karya ilmiah (tesis, disertasi, buku, buletin, jurnal, laporan-laporan penelitian, makalah-makalah seminar). Di samping itu, peneliti juga memperku- at dan melengkapi data dengan dokumen yang bersumber dari pemerintah seperti persuratan, un- dang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Dokumen lain yaitu dapat pula ditelusuri pada liputan atau pemberitaan dari media massa seperti media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan kajian studi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi politik kelompok nelayan mereduksi Politik Patron-Klien antara punggawa dan elit politik di Kabupaten Maros serta pengaruhnya pada kehidupan demokrasi masyarakat nelayan. Hubungan Patron-klien telah membudaya di tengah masyarakat nelayan sejak lama. Terlebih di tengah masyarakat nelayan Bugis-Makassar, khususnya di masa kekuasaan feodal raja-raja Bugis-Makassar yang memang melanggengkan praktik-praktik hubungan ini sebelumnya. Tokoh pemuda nelayan Bontoa, Abdul Muis mengatakan bahwa pengaruh politik seorang punggawa di daerahnya berlangsung sangat kuat di tengah masyarakat nelayan. Menurutnya, dalam proses elektoral punggawa dapat mempengaruhi pilihan politik melewati batas teritori tempat atau desa mereka bermukim.

“Dalam pemilihan kepala desa misalnya, mereka bisa mempengaruhi hasil pemilihan di desa lain dengan cara mengarahkan pilihan politik sawi mereka yang bermukim di desa tersebut. Hal ini banyak terjadi. Seperti di Desa Tupabbiring namanya, pada pemilihan kepala desa 2017 lalu, beberapa orang asli yang mencalonkan di desa itu secara personal dan kualitas sumber daya dikenal baik masyarakat. Tetapi bisa mereka dikalahkan oleh calon yang datang dari desa tetangga yang didukung oleh seorang punggawa dari desanya itu. Bisa dibayangkan dia tinggal dan menetap di desa lain tapi bisa mempengaruhi pemilihan kepala desa di desa lainnya. Padahal banyak tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh juga di desa ini. Dilihat dari latar belakangnya sebagai orang Bugis, tapi justru bisa mempengaruhi etnik Makassar yang lebih mayoritas di daerah ini. Padahal di kawasan ini komunitas Bugis dan Makassar terlibat konflik urat syaraf yang disebabkan kepemilikan kapal saat Ibu Susi melarang penggunaan cantrang.”

Kemenangan-kemenangan politik di tengah masyarakat nelayan Bontoa pada proses elektoral tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional juga tidak lepas dari pengaruh punggawa. Menurut salah seorang punggawa di Bontoa, Bahri yang tepatnya berdomisili di Desa Tupabbiring, bila mereka membutuhkan dukungan secara politik untuk meloloskan kepentingannya ke tingkat elit, seorang punggawa bisa menggunakan pengaruhnya kepada nelayan sawi yang bekerja kepada mereka.

“Sudah menjadi kebiasaan sejak lama bahwa seorang nelayan sawi akan mengikuti keputusan punggawanya dalam hal tertentu, termasuk dalam pilihan politik selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip moral yang dianut di tengah oleh mereka. Prinsip moral itu seperti mengorbankan nilai-nilai yang mereka percaya”.

Efektifitas pengaruh politik punggawa ini telah dibuktikan Bahri dalam beberapa momentum elektoral, seperti pada pemilihan anggota legislatif daerah dan pusat pada tahun 2015, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2015, Bahri mengaku baru mempekerjakan sebanyak 22 nelayan dalam usaha rajungan kepitingnya. Jaringan nelayannya juga belum seberapa dibanding punggawa-punggawa lain yang usahanya lebih dulu beroperasi di Bontoa. Sebanyak 22 nelayan sawi yang bekerja di usahanya memberikan dukungan politik sesuai arahannya. Termasuk jaringan nelayan-nelayan tersebut.

Jaringan nelayan untuk rajungan kepiting terdiri dari nelayan pencari kepiting di pesisir Bontoa hingga ke kabupaten tetangga seperti Pangkep. Menurut Bahri, punggawa juga memiliki pengaruh politik pada jaringan nelayan karena mereka tergantung dari sisi pasar kepiting dan ikan. Sebagian bahkan memiliki ketergantungan karena punggawa memberikan bantuan-bantuan ke nelayan seperti subsisdi bahan bakar dan alat tangkap.

“Hubungan timbal balik sebenarnya. Karena punggawa juga butuh pasokan bahan baku untuk usaha rajungan kepiting dan penjualan ikan. Terutama kepiting karena bahannya lebih langka dibanding ikan. Oleh karena itu intervensi pada sisi modal dan alat tangkap memang harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan pasokan dari nelayan. Di sisi lain, nelayan juga terbantu karena operasional melaut memang lebih mahal, terutama untuk kebutuhan bahan bakar, alat tangkap seperti bubu kepiting dan perahu bahkan”.

Hubungan patron-klien dalam politik ini semakin kuat karena didukung oleh faktor keterbatasan nelayan dalam pendidikan. Mereka akhirnya lebih banyak menggantungkan urusan-urusannya pada punggawa yang umumnya lebih terdidik. Urusan tersebut berupa pengurusan administrasi pemberian bantuan alat tangkap, bantuan kesehatan, dan pendidikan bagi anak nelayan, serta modal usaha. Termasuk kemudahan-kemudahan bagi nelayan dalam urusan administrasi kepemilikan kapal, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Bahri sebagai berikut :

“Dalam urusan administrasi kapal misalnya, nelayan ini sangat butuh uluran pihak yang dianggap memiliki pendidikan di tengah mereka. Karena tingkat pendidikan yang tidak memadai membuat nelayan tidak memiliki rasa percaya diri untuk hal-hal seperti itu. Dan juga rasa percaya terhadap orang lain. Mereka menyadari dengan pengetahuan mereka yang terbatas pada urusan menangkap ikan di laut, kemungkinan untuk menemukan kesulitan bila berurusan dengan masalah administrasi berpeluang besar terjadi. Terlebih selama ini memang ada oknum dalam urusan seperti itu suka memanfaatkan, minta bayaran, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu sangat berpengaruh.”

Hubungan patron-klien yang kuat ini membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial dan politik di tengah masyarakat Bontoa. Prinsip-prinsip demokrasi yang menuntut keterbukaan dan kebebasan bagi individu untuk menentukan pilihan-pilihan politik sesuai keinginan serta kepentingannya terhambat oleh intervensi pilihan politik seorang punggawa. Dengan demikian representase politik nelayan di tingkat pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah boleh dibilang tidak lagi berhubungan langsung dengan individu nelayan melainkan pada kepentingan punggawa yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan legitimasi sosial di tengah masyarakat nelayan.

Hubungan yang menciptakan ketergantungan ini juga disadari oleh tokoh-tokoh anak muda nelayan yang memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi masyarakat nelayan. Salah satu di antaranya, Rusman yang 10 tahun lalu dikenal sebagai anak muda progresif dari nelayan dusun Binasangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Rusman dikenal sebagai sosok nelayan yang kritis sehingga selalu merasa gelisah menyaksikan kehidupan nelayan di sekitarnya, miskin, terbelit utang, dan masa depan pendidikan anak-anaknya suram. Kegelisahannya itu bersambut dengan masuknya program pemberdayaan sejumlah LSM ke Ampekale pada tahun 2012. Rusman mendapatkan pengetahuan tentang pemberdayaan nelayan dan mendapatkan pelatihan- pelatihan dalam peningkatan kapasitas mengolah usaha dari mereka. Awalnya Rusman mengaku menjaga jarak dan menaruh waspada pada LSM terakait. Ia berusaha menghindar dengan sengaja mendorong istrinya untuk lebih berperan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Menurutnya sebagai nelayan di desanya yang masih awam saat itu, umumnya memiliki sikap yang sama seperti dirinya, menghindar dan menjaga jarak dengan orang luar .

Namun demikian, keterlibatan istrinya justru mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Ia dinilai telah mengabaikan kedudukannya sebagai istri yang secara budaya harus lebih banyak di urusan domestik mengurus suami dan anak-anaknya di rumah. Rusman melihatnya berbeda. Menurutnya, ia melihat perubahan besar pada istrinya sebagai diungkap sebagai berikut :

“Setelah mengikuti berbagai pelatihan ia lebih aktif dalam berbagai kegiatan. Ia aktif mengorganisir istri-istri nelayan membuat usaha sampingan seperti keripik kepiting, dan lain-lain. Pelan-pelan saya mulai menerima aktivitas dari sejumlah lembaga donor. Saya melihat ada peluang secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang selama ini lebih tergantung pada punggawa-punggawa”.

Rusman mulai ikut mengorganisir nelayan di desanya dengan berbekal pendidikan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai pelatihan. Ia memandang jalan untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan terbuka. Terlebih perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan mulai besar.

“Saya juga melihat bantuan dari pemerintah mulai banyak ke desa-desa nelayan. Saya dengar syarat untuk mendapat bantuan adalah harus memiliki kelompok nelayan yang di SK-kan pemerintah kabupaten. Mendengar hal itu saya langsung temui teman-teman nelayan di dusun saya. Saya ajak musyawarah, kemudian ada keputusan, saya diminta mewakili mereka untuk urus di pemerintah. Saya ke kecamatan, di sana saya diberitahu, bahwa sebelumnya di dusun kami sudah pernah ada kelompok nelayan tapi sudah tidak aktif. Kelompok nelayan itu sudah ada sejak masa pemerintahan orde baru. Usianya sudah 30 tahun. Tokoh nelayan yang dirikan masih hidup.”

Rusman menemui tokoh yang dituakan tersebut untuk meminta restu dan izin mengaktifikannya kembali kelompok nelayan yang diberi nama Kelompok Nelayan Binasangkara II. Kelompok nelayan yang dikoordinir Rusman bergeliat kembali pada tahun 2012. Berbagai program pemberdayaan yang dibantu lembaga donor dan pemerintah giat dilakukan Rusman. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan termasuk mendorong kemandirian nelayan dan istri-istri nelayan. Rusman mendirikan koperasi untuk kelompok nelayan dan membantu nelayan mengakses pinjaman modal dari bank. Rusman juga berusaha menciptakan sumber penghasilan baru bagi nelayan seperti budi daya rumput laut.

Kelompok nelayan Rusman mencapai jumlah ratusan hingga tahun 2013 dan termasuk yang paling sukses di Kecamatan Bontoa. Nelayan-nelayan dalam kelompoknya lebih mandiri. Namun usaha Rusman ini bukan tanpa tantangan. Kelompok nelayan dan pemberdayaan yang dilakukannya sempat mendapat tekanan dari para punggawa dan kepala-kepala dusun. Sebagaimana yang diutarakannya sebagai berikut :

“Saya pernah dipanggil ke kantor desa. Di sana saya seperti disidang, dikelilingi beberapa punggawa dan kepala dusun. Kegiatan ini sangat menggangu kepentingan dan dominasi mereka. Nelayan sudah tidak mau lagi jual ikan murah ke mereka, tempat ambil pinjaman juga sudah langsung di bank. Sistem koperasi yang didirikan juga menempatkan anggotanya setara. Ada pembagian hasil usaha, dan sebagainya. Sekarang tidak ada lagi punggawa di tempat kami.”

Tidak sekadar membantu nelayan untuk mandiri. Pada perkembangannya kelompok nelayan Rusman semakin menyadari kelas nelayan secara politik. Terutama dalam memperjuangkan kepentinganya secara politik di kabupaten. Tidak bisa dipungkiri bahwa program bantuan pembangunan infrastruktur atau program-program public goods kemudian kebijakan berupa kemudahan mengurus perizinan dan lain sebagainya membutuhkan nilai tawar politik. Kesadaran ini juga makin menguat seiring besarnya kepentingan elit politik pada nelayan sebagai pemilih.

Akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya khususnya bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka juga kini semakin terbuka. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang semakin inklusif dengan mendorong program-program pemberdayaan nelayan di Indonesia. Sementara proses politik terbuka juga memberikan alternatif baru untuk mendapatkan sumber daya ekonomi. Untuk menjadi terpercaya, nelayan membutuhkan aksi yang lebih riil bagi mereka. Selain itu dengan sistem politik terbuka relasi sosial dan politik cenderung dibangun di atas kepercayaan yang berdasarkan dua faktor yaitu relasi rasional dan emosional.

Nelayan di Bontoa mulai mempertimbangkan pilihan berdasarkan pilihan rasional. Tetapi yang dipengaruhi oleh kebutuhan mereka atas sumber daya dari pemerintah. Pergeseran ini juga telah dungkap oleh Pelras maupun peneliti-peneliti politik patronase awal. Menurut Pelras, walaupun politik patronase berkembang lama pada masyarakat Sulawesi Selatan, seiring waktu pola hubungan tersebut mengalami perubahan. Sejak masa penelitian Chabot, kemudian Pelras, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam segala aspek. Termasuk dalam tatanan kekuasaan atau politik, sistem pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya berubah setelah masa kemerdekaan. Kedudukan patron yang banyak dipegang kaum bangsawan di masa sebelum kemerdekaan pelan-pelan digeser oleh patron yang didasarkan pada kekuasaan negara dan pemerintah serta modal ekonomi. Kesetiaan memiliki harga yang menuntut seorang patron untuk mampu menghidupi seorang klien tidak hanya rasa aman akan tetapi juga kebutuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.

Pandangan ini dapat dilihat pada defenisi yang dikemukakan oleh para pakar di bidang ilmu sosial dan politik. Kepercayaan adalah pilihan rasional yang menekankan alasan memadai untuk mempercayai seseorang atau dapat dipercaya (Warren, 1999, hal. 329). Secara umum, ada dua pendekatan teoritis dalam memeriksa konsep kepercayaan politik, yaitu pendekatan budaya dan pendekatan institusional (Mishler dan Rose, 2001; 2005; Askvik et.al, 2011; Wong et.al, 2011). Norma budaya ini mempengaruhi persepsi dan harapan dalam diri seorang pemimpin politik tertentu dan lembaga yang tampaknya mencerminkan kelompok tertentu 'bangsa identitas atau nilai (Askvik et.al, 2011, p. 419). Selain itu, sebuah studi dari Christensen dan Laegreid (2005) mendukung pendekatan ini yang menunjukkan bahwa kepercayaan politik ditentukan oleh indikator sosial-demografi seperti usia, pendidikan dan pekerjaan (Wong et.al, 2011, p. 266).

Perubahan ini juga seiring berlangsungnya proses transformasi masyarakat dari tradisional yang didukung oleh industrialisasi ke masyarakat modern. Perubahan struktur politik juga memiliki pengaruh besar dalam hal ini. Setelah reformasi tahun 1998, menyusul amandemen 1999 struktur politik di Indonesia berubah secara fundamental dan kondisi ini mendorong terjadinya persaingan terbuka di kalangan aktor politik. Tingginya persaingan turut pula mengubah cara pandang masyarakat terhadap proses politik. Masyarakat meningkatkan nilai tawar secara transaksional sebagai pemilik suara dalam pemilihan langsung sehingga mempengaruhi relasi patron-klien. Patron dan kliennya sama-sama memiliki kekuatan atau otoritas dalam hubungan politiknya. Fenomena itu juga terjadi pada masyarakat nelayan di Bontoa. Punggawa bukan lagi satu-satunya aktor perantara yang dapat mendominasi pengaruh politik terhadap nelayan. Kian banyaknya program bantuan dan pemberdayaan pada masyarakat nelayan membuka kran terhadap modal usaha. Perbankan juga memberi kemudahan sehingga memungkinkan individu mengakses modal dan sumber daya. Di antara nelayan muncul pula individu- individu yang kritis terhadap kondisi ekonomi mereka serta memahami organisasi.

Kelompok nelayan di Dusun Binasangkara bahkan sudah menggeser peran dan fungsi politik punggawa sebagai aktor perantara dalam relasi patron- klien dengan elit politik. Berbeda dengan punggawa, kelompok nelayan membangun nilai tawar atas kesadaran bersama dan untuk kepentingan bersama. Keputusan juga diambil melalui musyawarah bersama sehingga dukungan politik mereka benar-benar solid, satu suara. Sementara punggawa lebih mementingkan personalnya sebagai penerima barang sebagai kompensasi dukungannya. Punggawa juga memanfaatkan barang untuk mengukuhkan pengaruhnya atas nelayan-nelayan sawi yang bekerja untuknya. Sikap mementingkan pribadi seringkali melahirkan kekecewaan-kekecewaan tersembunyi di kalangan nelayan sehingga berpeluang memutuskan sendiri pilihannya secara diam-diam. Kesadaran akan pentingnya nilai tawar politik telah tertanam di kalangan mereka menurut Rusman. Oleh karena itu, setiap mendekati pemilihan legislatif dan kepala daerah mereka sudah membangun komunikasi politik ke kabupaten. Menyambut perhelatan lima tahunan tersebut, Rusman menjelaskan bahwa, mereka membangun komunikasi politik jauh-jauh hari. Bahkan sebelum pemilihan legislatif. Upaya komunikasi penting dilakukan untuk mengetahui peluang setiap aktor politik pada pemilihan legislatif.

“Saya selalu diutus oleh teman-teman ke kabupaten. Tugas saya mencari tahu atau semacam survey kecil-kecilan, siapa tokoh politik yang bertarung dari dapil dua. Dan tentu saja yang memiliki peluang menang. Pertimbangannya dari segi ketokohannya, kedekatannya dengan bupati, aksesnya terhadap proyek yang berkaitan langsung dengan nelayan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah aksesnya ke program dan proyek serta memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan nelayan di Bontoa. Tidak cukup di situ, saya juga telusuri ke Dinas KKP, saya tanya pejabat-pejabat strukturnya di situ, siapa tokoh politik yang mereka dukung. Semuanya itu berpengaruh saat memperjuangkan bantuan ke nelayan nantinya. Terbukti kedekatan kami dengan tokoh politik yang sangat dekat dengan petahana, memudahkan program turun ke desa kami.”

Rusman kembali ke Bontoa setelah melakukan komunikasi secara intensif, penelusuran ke kabupaten, atau melakukan survey kecil-kecilan. Pada beberapa kesempatan mereka akan menggelar rapat dengan anggota kelompok untuk menentukan politisi yang akan dipilih pada Pileg. Tidak ketinggalan mendiskusikan pula peluang-peluang dari keputusan politik yang mereka ambil bersama. Menurutnya pilihan pada saat Pileg sangat menentukan pula pada pilihan Pilkada.

“Demi kepentingan bersama, keputusan berdasarkan kesepakatan pada rapat kami jalankan dengan komitmen kuat. Setiap anggota menarik lagi pilihan dari anggota keluarganya, anak, istri, sepupunya. Dalam satu rumah, bisa dua kepala rumah tangga di dalamnya, sehingga pengaruhnya cukup besar. Pada Pilkada serentak, saya sebagai ketua tim petahana di dusun. Selama kampanye yang saya tekankan ke nelayan adalah bantuan rabat beton, perbaikan dermaga, dan kemudahan memperoleh modal. Saya jelaskan ke warga program itu tidak turun begitu saja ke nelayan tetapi diperjuangkan oleh bupati dari pemerintah pusat. Kita harus mendukungnya. Alhamdulillah, pada Pilkada serentak saya tak mengeluarkan sepeser pun uang ke nelayan. Saya kalah di TPS tapi, tapi kalah sangat tipis. Itu pun karena pihak lawan melakukan serangan fajar, Sementara kita, tidak.”

Secara politik, strategi nelayan seperti yang ditempuh Rusman dan kawan-kawan membawa dampak positif bagi kehidupan berdemokrasi di tengah masyarakat nelayan. Dengan model-model pendekatan pemberdayaan dan pengambilan keputusan bersama, masyarakat nelayan di dusun Binasangkara lebih mengerti dan memahami politik sebagai jalan bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah misalnya, muncul kesadaran kritis dari kalangan nelayan akan pentingnya peran seorang perwakilan di DPRD dan seorang bupati yang berpihak pada kepentingan-kepentingan nelayan

Mereka memiliki pendekatan yang berbeda terhadap nelayan pada tingkat paling bawah dengan mampraktikkan hubungan secara terbuka, timbal balik, dan bersifat rasional. Dalam artian proses pengambilan keputusan politik dilakukan secara demokratis, musyawarah mufakat, dan mempertimbangkan kepentingan bersama anggota nelayan. Jaringan kelompok nelayan melahirkan klien politik yang rasional dan memiliki komitmen politik yang kuat bagi kepentingan nelayan secara kolektif. Relasi atau hubungan komunikasi politik di tengah kelompok nelayan Binasangkara juga tidak mengikat secara ketat. Seorang anggota nelayan bebas mengekspresikan pilihan politik tanpa khawatir kepentingan ekonomi mereka terganggu sebagaiman mana dalam hubungan patron-klien punggawa-sawi. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya kelompok-kelompok nelayan baru.

“Setiap nelayan memiliki peluang bertumbuh secara ekonomi karena hubungan di dalam kelompok nelayan Binasangkara bersifat setara dan tidak menciptakan ketergantungan kepada nelayan. Terbukti, beberapa tahun lalu, nelayan Binasangkara hanya memiliki satu kelompok nelayan. Sekarang muncul dua tokoh nelayan selain saya, mereka juga membuat kelompok nelayan. Jadi, sudah ada tiga kelompok nelayan di Binasangkara”

Namun demikian, pergeseran dari punggawa ke kelompok nelayan hanya terjadi pada beberapa wilayah di Kecamatan Bontoa. Sebaliknya di desa lain punggawa justru terlegitimasi secara kuat. Mereka juga menyadari perubahan yang berlangsung baik kebijakan pembangunan maupun perubahan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, mereka turut pula mengorganisasi dan mendirikan kelompok nelayan. Posisinya sebagai aktor sentral dalam mendistribusikan kepentingan politik dari kabupaten ke Bontoa, tidak dapat digantikan di daerahnya. Di sinilah letak besarnya pengaruh arah kebijakan pemerintah yang dimanfaatkan secara politik. Persis sama dengan pandangan-pandangan kaum institusionalis bahwa lembaga politik memiliki pengaruh besar terhadap struktur hubungan patronase pada masyarakat seperti yang terjadi di Bontoa. Pada satu sisi pemerintah sebenarnya mampu menciptakan rekayasa sosial sehingga peran punggawa yang memonopoli kapital di tengah masyarakat nelayan dapat digeser seperti yang disaksikan padapenguatan kelompok nelayan milik Rusman. Tetapi di sisi lain justru menguatkan posisi punggawa secara ganda. Pada demografi tertentu punggawa semakin kuat karena di samping sebagai punggawa yang memiliki basis material besar juga menduduki posisi sebagai ketua kelompok nelayan.

**Daftar Pustaka**

Aspinall, Sukmajati dkk. (2015). *Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014)*. Yogyakarta: PolGov.

Aspinall, Edward. (2014). *Parliament and Patronage. Journal of Democracy, Volume 25, Number 4, October 2014, pp. 96-110 (Article)*

Ahimsa Putra, H. S. (2007). *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional Struktural.* Yogyakarta: Kepel Press.

Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bruinessen, Martin. (2013). *Rakyat Kecil, Islam dan Politik.* Yogyakarta : Penerbit Gading.

Batta, Anna\_\_\_*Statisme (Teori Negara). Ishiyama, John T dan Breuning, Marijke (ed.)(2013). Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21.*Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Burhan, Bungin. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chilcote, Ronald H. (2010). *Teori Perbandingan Politik; Penelusuran Paradigma (terjemahan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Dhal, Robert. (1991). *Analisis Politik Modern*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Darajati, Wahyuningsih*\_\_\_Strategi Nasional Pembangunan Kemaritiman dan Pemberdayaan Nelayan Indonesia.* Paper yang dipresentasikan dalam Workshop Nasional Sekaya Maritim, Jakarta, 3 Desember 2015.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Kenelayanan. (2015). *Peningkatan Kehidupan Nelayan Berbasis Program Penanganan Penghidupan Berkelanjutan.* Paper yang dipresentasikan dalam Workshop Nasional Sekaya Maritim, Jakarta, 3 Desember 2015.

Edy P, Slamet\_\_\_*Upaya OJK dalam Memperluas Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan Nasional*. Paper yang dipresentasikan dalam Workshop Nasional Sekaya Maritim, Jakarta, 3 Desember 2015.

Fukuyama, Francis. (1995). *Trust; Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (terjemahan).* Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Fatwa, Andi M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD* 1945. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Gaus F, Gerald, Kukathas, Chandran. (2004). *Handbook Teori Politik* (terjemahan). Bandung : Nusa Media.

Geertz, Clifford. (2013). *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (terjemahan)*.* Jakarta : Komunitas Bambu.

Hiariej, Eric\_\_\_*Lahirnya Pasca-Klientelisme di Indonesia. Savirani, Amalinda dan Tonrquist, Olle (ed.)(2016). Reclaming The State; Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* : Yogyakarta: PolGov dan *PCD Press.*

Harjanto. (2012). *Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol. Jurnal AKP Vol 1, N0 2, 2013.*

Hanif, Hasrul. (2010). *Politik Klientelisme Baru dalam Kepartaian di Indonesia*. *Jurnal Sosial & Politik (JSP), Vol.13, No.5, 2010.*

Indrayana, Denny. (2008). *Mendesain Presidensial yang Efektif, dalam Negara Antara Ada dan Tiada*. Jakarta : Kompas Gramedia.

\_\_\_\_\_\_\_\_(2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21, Sebuah Referensi Panduan Tematis, jilid 1 dan 2* (Terjemahan)*. John T Ishiyama dan Marijke Breuning (ed.)(2013.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Kausar Bailusy, Muhammad. (2012). *Politik Lokal dalam Sistem Otonomi Daerah.* Jakarta : Mahzab Ciputat.

Lexy J. Moleong (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, Buhanuddin. (2013). *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party ID” dan Patron-Client. Jurnal Politik LIPI Vol.10, No. 1, 2013.*

Mujahid Fahmid, Imam. (2012). *Identitas dalam Kekuasaan; Hibiradas kuasa, Uang, dan Makna dalam Pembentukan Elit Bugis dan Makassar*. Makassar : Ininnawa.

Marijan, Kacung. (2006). *Partai Baru, Electoral Threshold dan Masa Depan Sistem Multi Partai, dalam Jurnal Politika Vol. 2, No. 2, 2006.*

Nordholt, H. C. dkk. (2014). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV Press dan YOI.

Putra H.S, Ahimsa. (2007). *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional Struktural.* Yogyakarta: Kepel Press.

Pelras, Christian\_\_\_ *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Tol, Roger dkk (ed.) (2009). Kuasa dan Usaha di Sulawesi Selatan.* Makassar: Penerbit Ininnawa.

Sumarto, Muliady. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilu.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soeseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik; Perkembangan dari Ajektiva ke Teori.* Depok : PUSKAPOL UI

Sabri, Muhammad. (2012). *Presiden Tersandera; Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidensial-Multipartai Terhadap Relasi Presiden-DPR du Masa Pemerintahan SBY-Budiono.* Jakarta : PT Wahana Semesta Intermedia.

Scott, James\_\_\_*Patron-client Politics and Political Change in Southeast. The American Political Science Review, Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972). Tersedia di: http://www.jstor.org/stable/1959280. (*diakses pada : 14 April 2016)

Gibson, Thomas. (2012). *Narasi Islam dan Otoritas di Asia Tenggara, Abad ke 16 hingga abad ke 21.* Makassar :Penerbit Ininnawa.

Tim Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2015). *Strategi dan Implementasi Program Sekaya Maritim 2015.* Paper yang dipresentasikan dalam Workshop Nasional Sekaya Maritim, Jakarta, 30 Oktober 2015.

Tim Riset Perludem Bekerjasama Kemitraan dan Institute For Strategic Initiatives. (2012). *Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye.*

Tersedia di : http://www.kemitraan.or.id/sites. Diakses pada : 14 April 2016.

Weingrod, Alex. (1968). *Patrons, Patronage and Political Parties, Comparative Studies in Society and History. Cambridge Journals Vol.10, No.4, 1968.*

Yani, Andi\_\_\_*Budaya Politik Orang Bugis dalam Dinamika Politik Lokal*. Tersedia di: https://www.academia.edu*.* Diakses 14 April 2016.

Zaini, Muhammad\_\_\_*Program Sekaya Maritim Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah Dan Maju Tahun 2015-2019.* Paper yang dipresentasikan dalam Workshop Nasional Sekaya Maritim, Jakarta, 30 Oktober 2015.

Website Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros, tersedia di : http:// kpu.maroskab.go.id, diakses 14 April 2016.

Portal Berita Harian Tribun Timur, tersedia di : http://m.tribunnews.com/ nasional/2014/12/25/sejak-otonomi-daerah-70-persen-kepala-dan-wakil-kepala- daerah-terjerat-korupsi, diakses 7 April 2016.